



iversitas indraprasta pgri SCI-MEET https://www.doi.org/10.37010/duconomics.v1

### Development of Boat Rental Service Business of Panglima Laot Organization Towards Independent BUMDes in Banda Aceh City

Pengembangan Usaha Layanan Sewa Boat Organisasi Panglima Laot Menuju BUMDes Mandiri di Kota Banda Aceh

Author

Rahmattullah Universitas BBG Kota Banda Aceh rahmattullah@bbg.ac.id Abstract

The development of governance for boat rental services by the Panglima Laot organization in Banda Aceh City is needed as a manifestation of the achievement of the aspirations of the youth of Meuraxa District to have a BUMDes in an independent village administration administrative bureaucracy. For the change from this creative effort to BUMDes, it is necessary to reform the governance of business units that are currently being carried out in the establishment document. Currently, a boat rental business <mark>is</mark> runn<mark>in</mark>g for f<mark>is</mark>hing activities, b<mark>oth</mark> by lo<mark>cal reside</mark>nts and by other residents who rent boat equipment in Meuraxa District. Besides, it is also used by tenants to do sea fishing as a hobby. This study aims to develop a boat rental service management system for the Panglima Laot organization through administrative reform of business unit management towards an independent BUMDes. This research is qualitative. In the development of this business, after reviewing the potential of both human and natural resources, it is found that this business service has the potential to increase income and prevent unemployment of the local community which results in reducing poverty rates in the assumption that all human and natural resources can work together. realize independent BUMDes. So that this creative business deserves to be developed to become a growing business for the future under the guidance of a village legal entity in the form of an Independent BUMDes.

## **Duconomics Sci-meet**

2021

VOLUME 1 JULI

Page

263-268

DOI

10.37010/duconomics.v1.5452

Corresponding Author

Rahmattullah@bbg.ac.id 081360965856

#### Keywords

Development, Service Business, Boat Rental, Independent BUMDes

#### Abstrak

Pengembangan tata kelola layanan sewa boat organisasi panglima laot di Kota Banda Aceh diperlukan sebagai wujud dari pencapaian cita cita pemuda pemudi Kecamatan Meuraxa untuk memiliki sebuah BUMDes dalam tatanan birokrasi administrasi pemerintahan desa yang mandiri. Untuk perubahan dari usaha kreatif ini menuju BUMDes, diperlukan reformasi tata kelola unit usaha yang digeluti saat ini dalam dokumen pendirian. Saat ini sedang berjalan usaha sewa boat untuk kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan oleh penduduk setempat maupun oleh penduduk lain yang menyewakan peralatan boat di Kecamatan Meuraxa. Disamping itu juga digunakan oleh penyewa untuk melakukan hobi wisata memancing di laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengelolaan Layanan Sewa boat organisasi panglima laot melalui reformasi administrasi pengelolaan unit usaha menuju BUMDes mandiri. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam pengembangan usaha ini, setelah meninjau potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam, maka didapat hasil bahwa layanan usaha ini berpotensi meningkatkan pendapatan dan mencegah pengangguran masyarakat setempat yang berakibat pada menurunkan angka kemiskinan dalam asumsi semua sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat bekerjasama mewujudkan BUMDes mandiri. Sehingga usaha kreatif ini layak dikembangkan untuk menjadi sebuah usaha yang berkembang untuk masa yang akan datang dibawah binaan badan hukum desa berbentuk BUMDes Mandiri

#### Kata kunci

Pengembangan, Usaha Layanan, Sewa Boat, BUMDes Mandiri

# **264**

Merdeka Belajar dan Tantangan Ekonomi dalam Menyongsong Era Society 5.0

#### **PENDAHULUAN**

Panglima laot adalah perwakilan dari beberapa kapten kapal dalam sebuah organisasi adat laut di Provinsi 'Aceh. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Panglima Laôt (atau Panglima Laot) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Organisasi panglima laot sudah terbentuk dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi. Pada tingkat kecamatan, panglima laot dikenal dengan istilah panglima lhok. Penelitian ini mengkhususkan pada kawasan kecamatan yang mencakup aktivitas panglima laot lhok.



Gambar 1. Tempat parkir kapal nelayan pesisi pantai.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menggariskan bahwa tugas panglima laot bekerjasama dengan pemerintah dalam tugas adat istiadat dan hukum laut; mendukung pemerintah dalam perikanan dan kelautan; mengurus masalah laut nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut, amanah lingkungan laut, kawasan pesisir dan seisi laut; kesejahteraan nelayan; ilegal laut.

Pada tahap perencanaan, organisasi panglima laot memiliki potensi. Pertama adalah berupa potensi fasilitas laut yang merupakan aset milik pribadi untuk disewakan kepada orang lain dalam kegiatan melaut dan wisata. Kedua adalah berupa perlatan dan keahlian membuat kapal tradisional. Ketiga adalah sumberdaya manusia dalam mendampingi wisatawan maupun jasa kontrak tenaga operator mesin kapal.

Pada tahap pengorganisasian, panglima laot dapat melakukan rapat dengan mengundang berbagai kapten kapal untuk duduk bermusyawarah jika sewaktu-waktu diperlukan. Dalam rapat, panglima laot menentukan waktu melaut dan membagi wilayah masing masing kapten kapal dalam menangkap ikan.

Pada tahap pelaksanaan, panglima laot dapat memerintahkan kapten kapal untuk tujuan dan keperluan organisasi. Dalam hal ini Kapten kapal akan tunduk pada aturan yang telah diperintahkan oleh panglima laot. Keahlian di bidang melaut lebih tinggi panglima laot dibandingkan dengan kapten kapal. Panglima laot memiliki mandat atas wilayah masing masing. Panglima laot lhok adalah panglima laot yang tunduk pada panglima laot kabupaten. Dalam organisasi panglima laot, yang paling tinggi yaitu panglima laot provinsi.

Pada tahap evaluasi, panglima laot menerima informasi dari darat dan laut berupa permasalahan dan komplain dari masyarakat juga kapten kapal tentang permasalahan operasional organisasi. Dalam hal ini panglima laot memberi jalan keluar dan mengambil sanksi jika terjadi pelanggaran di laut.







Dalam kondisi lain terdapat peran yang tidak kalah penting nya dengan panglima laot dalam ikut mensejahterakan masyarakat nelayan yaitu BUMDes. Mardatila menyatakan bahwa BUMDes merupakan sebuah usaha desa dikelola secara ekonomis dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pusat Pelayanan Publik menjelaskan bahwa BUMDes mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Adapun tugas BUMDes yang dikutip dalam desabisa.com yaitu meliputi seluruh operasional BUMDes sesuai AD/ART, membuat laporan pertanggung jawaban semesteran dan mengembangkan usaha untuk kemakmuran masyarakat umum.

Kolaborasi yang sinergis antara organisasi panglima laot dan bumdes dapat terlaksana dalam wadah ekonomi satu atap. Potensi dan kondisi yang dari panglima laot yang ada sekarang dapat mengikuti tahapan yang dijelaskan pada tahap pelaksanaan, seluruh staff dan pekerja melakukan tugasnya dengan baik, serta pembagian tugas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang dimaksud dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu bumdes melayani kegiatan sewa menyewa untuk umum yang ada unsur pemasukan dananya, sedangkan permasalahan hukum laut untuk kegiatan kapal penangkap ikan yang tidak ada unsur pemasukan dana ditangani oleh panglima laot. Pada tahap evaluasi dilakukan oleh organisasi panglima laot.

Dari hasil observasi dan wawancara lapangan didapat bahwa Potensi yang dari pembentukan BUMDes Mandiri Panglima Loat, yaitu: pertama, organisasi panglima laot mempunyai keahlian dibidang perlayaran tradisional; kedua, organisasi panglima laot memegang hukum adat laut turun temurun yang cukup kuat dan disegani oleh nelayan nelayan dan kapten kapal yang berlayar ke laut; ketiga, organsasi panglima laot memiliki modal yang cukup berakar organisasi seperti peralatan dan kapal melaut.

Rintangan yang menyelimuti pembentukan BUMDes Mandiri Panglima Loat, yaitu: pertama, organisasi panglima laot tidak mengerti tentang keuangan; kedua, hasil tangkapan ikan berfruktuasi; ketiga, harga jual ikan berfruktuasi yang dipengaruhi olah pasokan ikan dari daerah lain. Disamping potensi dan rintangan, juga didapat peluang dan hambatan untuk bisa berdirinya sebuah BUMDes di Kecamatan Meraxa kawasan panglima laot. Peluang yang memuluskan beridirinya BUMDes panglima laot yaitu: tangkapan ikan terkadang cukup besar, potensi laut sangat besar, diversifikasi dapat dikembangkan.

Hambatan yang bisa dianggap fatal dalam membesarkan organisasi untuk kesejahteraan bersama dari organisasi panglima laot adalah ketika hasil melimpah distribusi minim, pendanaan operasional sulit, pengetahuan mesin kurang.

Berdasarkan temuan temuan baik potensi, peluang, kelemahan dan hambatan dapat di lapangan, maka dapat dipetakan unsur di atas dalam Tabel 1 dibawah sebagai berikut:

Tabel 1 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan Bisnis Panglima Laot

Kekuatan	Kelemahan
<ol> <li>mempunyai keahlian perlayaran</li> <li>memegang hukum adat laut</li> <li>produksi ikan</li> </ol>	<ol> <li>tidak ada regenerasi</li> <li>tidak paham pembukuan</li> <li>kekurangan personil terampil</li> </ol>
Peluang	Hambatan
<ol> <li>tangkapan ikan terkadang cukup besar</li> <li>potensi laut sangat besar</li> <li>diversifikasi dapat dikembangkan</li> </ol>	<ol> <li>ketika hasil melimpah distribusi minim</li> <li>pendanaan operasional sulit</li> <li>pengetahuan mesin kurang</li> </ol>

Sumber: Hasil wawancara di lapangan (2021)

#### Metodologi Penelitian

#### Merdeka Belajar dan Tantangan Ekonomi dalam Menyongsong Era Society 5.0

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Wilayah ini belum memiliki BUMDes yang bekerjasama dengan panglima laot beserta kapten kapal penangkap ikan. Objek penelitian adalah Panglima laot beserta kapten kapal penangkap ikan. Teknik pengambilan data adalah melalui empat tahap. Tahap observasi, dilakukan tinjauan lokasi dengan mengamati sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh panglima laot dan kapen kapal penangkap ikan. Tahap wawancara dilakukan pendekatan kepada panglima laot dan kapten kapal penangkap ikan untuk mendapatkan data kepemilikan alat dan hasil tangkapan ikan di laut. Tahap FGD dengan jalan melakukan pendampingan kepada panglima laot dan kapten kapal mengisi blangko pilihan pertanyaan. Tahap terakhir adalah kajian literatur pustaka terhadap peraturan dan tugas BUMDes.

Teknik pengolahan data menggunakan SWOT. SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *dan Threats* (ancaman). (Priharto,S: 2019; Ramadhani,N: 2020, Hartono, T. (2021). Diagram analisis SWOT dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT, Simson (2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Setelah mengamati temuan di lapangan berupa potensi, rintangan, peluang dan hambatan maka dapat dibuatkan sebuah matrik analisis yang memetakan semua perihal beserta keputusan akhir pembentukan BUMDes untuk organisasi panglima laot dapat dilihat pada tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Pengamatan Lapangan Aktivitas Panglima Laot dan Kapten Kapal

	Peluang-Kekuatan	Peluang-Kelemahan
1.	tangkapan diatur oleh panglima laot	1. regenerasi dengan revolusi ekonomi
2.	potensi laut besar diawasi panglima laot dan kapten kapal	<ol> <li>pembukuan diserahkan ke BUMDes</li> <li>keterampilan didampingi BUMDes</li> </ol>
3.	diversifikasi untuk hilirisasi produksi laut	
	Hambatan-Kekuatan	IIb
	nambatan-Kekuatan	Hambatan-Kelemahan
1.	perlu diatur limpahan produksi dengan hukum laut	disaat panen tinggi BUMDes membeli ikan nelayan
1.	perlu diatur limpahan produksi dengan hukum laut	disaat panen tinggi BUMDes membeli ikan







	3, pembekalan ilmu dengan membekali teknik perawatan mesin
--	--

Sumber: Observasi dan Wawancara di Lapangan (2021)

#### **PEMBAHASAN**

Hambatan dan kelemahan dua sisi yang sama-sama tidak diharapkan dalam berbagai aktivitas. Ketika kelemahan terungkap, ini pertanda bahwa suatu sistem harus dititik beratkan perhatian. Namun ketika proses berjalan lancar tentu diupayakan harus juga ada sikap berjaga-jaga karena segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam perwujudan pembentukan BUMDes untuk para panglima laot, tentu yang diharapkan adalah adanya kredit ataupun insentif pemerintah dalam membantu rakyat kecil seperti nelayan. Namun ini harus disadari bahwa ketika dana digulirkan, tentu semua nelayan ingin mendapatkan tanpa mengingat untuk mengembalikan. Jika kondisi ini tidak adanya kerjasama antara panlima loat dan staff BUMDes tentang kelayakan mendapat pinjaman khusus dengan seleksi, tentu akan menyebabkan penyalah gunaan alokasi pinjaman dari nelayan. Umpama dilakukan untuk membeli sepeda motor adalah suatu kesalahan besar. Seharusnya untuk digunakan memperbaiki alat tangkapan ikan atau menggantikan spare part yang sudah patut diganti.

Pada kondisi sekarang dapat dilihat ada tiga hambatan yang jelas terlihat diantara hambatan lainnya. Hambatan yang menonjol itu berupa panen ikan, kuncuran dana, pengetahuan mesin. Ketika panen ikan melonjok, harga ikan akan turun dan nelayan yang tidak berfikir panjang akan melepaskan ikan kepada para tengkulak dengan harga sangat murah. Padahal jika ada BUMDes, ikan bisa ditampung dengan harga stabil dan nelayan tidak dirugikan. Dari kejadian ini dapat dikatakan bahwa hambatan pemasukan besar akibat limpahan produksi nyata terjadi akan melemahkan ekonomi nelayan jika tidak ada wadah BUMDes sebagai penampung produksi.

Kuncuran dana yang diserahkan tanpa adanya pendampingan, sangat merugikan nelayan karena salah alokasi. Seharusnya dana yang digunakan untuk produksi. Namun ketika nelayan mulai memegang uang, tersirat dalam hati mereka untuk mengalihkan uang tersebut jalur lain yaitu kredit sepeda motor. Tentu ini akan berefek pada hambatan kedepan dalam menutupi dua pengeluaran yang tidak terduga yaitu pengembalian pinjaman dan penutupan kredit. Untuk ini diperlukan pendampingan oleh staf BUMDes yang lebih mengerti untuk teknik lapangan penyaluran kredit dengan sistem angsuran dan penyicilan dengan produksi ikan.

Selanjutnya hambatan lain yang dapat dilihat yaitu kurangnya pengetahuan tentang mesin. Ketika mesin yang digunakan tidak diperhatikan kebutuhannya seperti pelumas maka mesin akan menunjukkan gejala tidak beroperasi secara perlahan-lahan namun kemudian bisa rusak mendadak. Tentu ini juga merupakan suatu hambatan yang disebabkan karena kelemahan tidak ada perawatan. Untuk ini dengan adanya BUMDes diharapkan adanya bantuan dari segi pendampingan ilmu juga adanya servis berkala yang bisa diingatkan oleh staff BUMDes kepada para nelayan.

#### **PENUTUP**

#### KESIMPULAN

Upaya pembentukan BUMDes di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dapat diestimasikan tidak dapat dinyatakan layak. Potensi yang kuat dan peluang yang besar untuk maju dapat meminimalisir kemungkinan terjadi rintangan dan hambatan dikemudian hari.

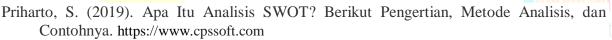
Dari penelitian ini didapat temuan baru yaitu kolaborasi antara dua keilmuan yang berbeda dalam satu pekerjaan dimana organisasi panglima laot menerapkan hukum tradisional dan bisnis ikan. Sementara BUMDes mendalami bidang bisnis yang juga berbadan hukum. Kolaborasi keilmuan hukum dan bisnis yang diperkuat dengan organisasi sangat menjamin kenyamanan pelaku usaha dalam hal ini adalah nelayan dan rakyat kecil yang ingin mencari nafkah di laut.

Merdeka Belajar dan Tantangan Ekonomi dalam Menyongsong Era Society 5.0

#### **SARAN**

Kajian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada instansi pemerintah untuk mendukung keberlangsungan hidup organisasi panglima laot. Peran organisasi panglima laot ini sebenarnya sudah sangat pancasilais karena serupa juga dengan tugas pengamanan yang dilakukan baik oleh polisi laut maupun angkatan laut yang mempertahankan laut dalam menjaga sumberdaya alam laut.

#### DAFTAR PUSTAKA



Ramadhani, N. (2020). Mengenal Analisis SWOT dengan Contoh Penerapannya. https://www.akseleran.co.id/blog/swot

Hartono, T. (2021). Pengertian Analisis SWOT dan Cara Menggunakannya. https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-analisis-swot-dan-cara-menggunakannya/

Simson. (2016). Analisis SWOT. https://blog.docoblast.com/2016/09/28/diagram-analisis-swot/

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2017). Mengenal Tugas Dan Fungsi Panglima Laot Di Aceh. https://kkp.go.id/djprl/artikel/18738-mengenal-tugas-dan-fungsi-panglima-laot-diaceh

Wikipedia, Panglima Laot. https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima La%27%C3%B4t

Mardatila, A. (2021). Bumdes adalah Badan Usaha Milik Desa, Ketahui Ciri dan Manfaatnya, https://www.merdeka.com/sumut/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-ketahui-ciri-dan-manfaatnya-kln.html

Pelayanan Publik.id. (2021). Apa Itu Bumdes, Ciri, Sifat, Dasar Hukum dan Fungsinya. https://pelayananpublik.id/2020/04/22/apa-itu-bumdes-ciri-sifat-dasar-hukum-dan-fungsinya/

Desabisa.com. (2019).Tugas dan Wewenang Pelaksana BUMDes yang Harus Dipahami. https://www.desabisa.com/tugas-dan-wewenang-pelaksana-bumdes-yang-harus-dipahami/



